



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2019



BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Salah satu aspek yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu terselenggaranya pemerintahan yang Good goverdan Clean government yang merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan guna mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu instrument sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih, transparan, dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Pematang sebagai implementasi UU No.12 thn 1999 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka mempertanggungjawabkan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan yang baik tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Inpres ini memerintahkan setiap instansi pemerintah agar membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dimana laporan ini sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya yang didasarkan pada suatu rencana strategik yang ditetapkan oleh instansi masing-masing. Atas dasar ketentuan tersebut di atas maka, kepada Kepala Daerah sebagai perwujudan pelaksanaan azas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap SKPD wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

1.1. DASAR HUKUM

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pematang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah di Bidang Penanaman Modal

1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang mempunyai tugas pokok, fungsi dan tata kerja sebagai berikut :

- **Tugas Pokok**

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Pasal 3 huruf d point 7 dan berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Bab III Pasal 4 adalah melaksanakan urusan pemerintah bidang penanaman modal, yang meliputi :

- a. Sub urusan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yaitu :
 - 1) Penetapan pemberian fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - 2) Pembuatan peta potensi investasi.
- b. Sub urusan Promosi Penanaman Modal yaitu penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
- c. Sub urusan Pelayanan Penanaman Modal yaitu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. Sub urusan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yaitu pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- e. Sub urusan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah.

- **Fungsi**

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang mempunyai fungsi:

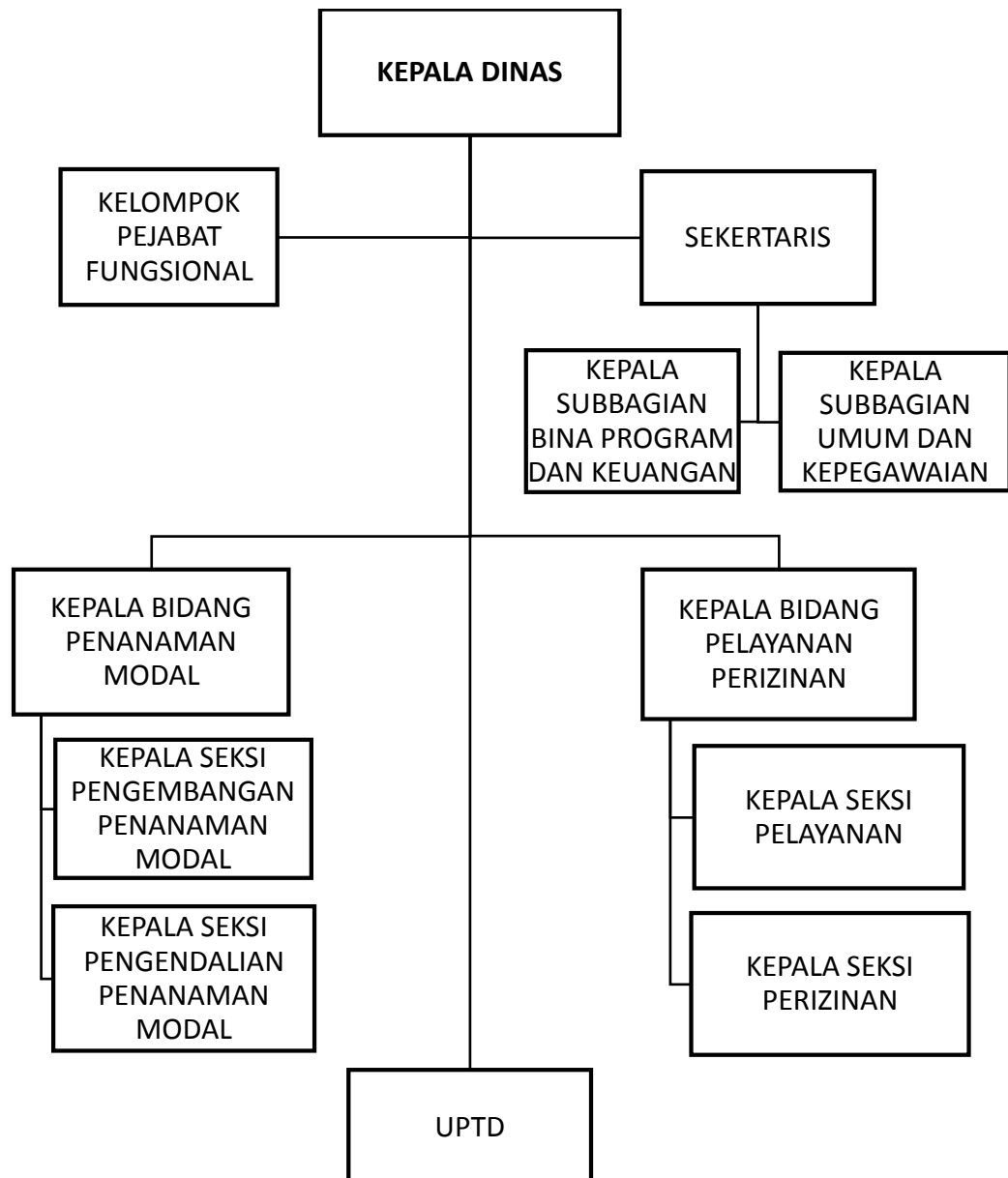
- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

- **Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekertariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Bina Program dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Penanaman Modal;
 2. Seksi Pengendalian Penanaman Modal;
- d. Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri dari:
 1. Seksi Pelayanan;
 2. Seksi Perizinan
- e. UPTD;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gb.1.2 BAGAN STRUKTUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG



B. Isu Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yang baru berdiri pada tahun 2017 dan memiliki tugas menangani urusan pemerintah bidang penanaman modal dimana sebelum berdirinya Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang untuk urusan penanaman modal diampu oleh tiga instansi yaitu untuk fusi pelayanan perijinan diampu oleh Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, fusi promosi diampu oleh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan fusi pengendalian diampu oleh Bagian Perekonomian Setda. Kabupaten Pematang.

Dengan digabungannya ketiga fusi dibidang penanaman modal, ada beberapa isu strategis yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan wajib non pelayanan dasar di bidang penanaman modal antara lain:

- a. Kuantitas dan Kualitas sumber daya manusia (PNS) yang belum memadai.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk penunjang pelayanan terpadu satu pintu
- c. Regulasi yang mengatur perizinan harus disesuaikan dengan perkembangan atau pandangan yang baru agar bisa berjalan efektif
- d. Masih kurangnya kajian potensi unggulan investasi di daerah
- e. Masih rendahnya promosi investasi di daerah
- f. Belum terintegrasinya pelayanan perizinan terpadu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi

Rumusan visi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih periode 2016-2021 yang telah ditetapkan sebagai visi Kabupaten Pemalang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 adalah **“TERWUJUDNYA PEMALANG HEBAT YANG BERDAULAT, BERJATIDIRI, MANDIRI DAN SEJAHTERA”**.

Adapun makna frasa yang terkandung dalam pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pemalang tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Pemalang Hebat

Terwujudnya Pemalang Hebat merupakan suatu kondisi dimana harapan, keinginan, cita-cita yang diharapkan menjadi ada. Pemalang Hebat merupakan *ultimate goal* yang dicita-citakan dan yang dibangun dari kondisi Pemalang yang berdaulat, berjati diri, mandiri dan sejahtera. **Pemalang Hebat** juga menjadi *tagline* pembangunan daerah dalam memacu semangat, percepatan dan sinergitas para *stakeholders* terkait dalam mengupayakan perwujudan pembangunan Pemalang.

2. Berdaulat

Berdaulat diartikan sebagai kemampuan pemerintah dan masyarakat Pemalang yang mampu membangun, mengatur dan mengurus kepentingan daerah/ rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat dan gotong royong, dengan tetap memperhatikan sinergitas pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik serta penegakan supremasi hukum.

3. Berjati diri

Berjatidiri diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang memiliki keunggulan yang berbasis *local wisdom/local value* dengan menumbuhkan kembali seni dan kebudayaan asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati.

4. Mandiri

Mandiri diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang mengandalkan dan mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang dimiliki, meningkatkan sarana prasarana infrastruktur dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan, pengembangan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal.

5. Sejahtera

Sejahtera diartikan sebagai kondisi masyarakat Pemalang yang berkualitas, peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat yang didukung daya saing masyarakat dan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PMPTSP sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Dinas PMPTSP memiliki peran dalam mewujudkan Visi Kabupaten Pemalang 2016-2021, terutama dalam upaya mewujudkan **Pemalang Berdaulat**. Yaitu sebagai kemampuan pemerintah dan masyarakat Pemalang yang mampu membangun, mengatur dan mengurus kepentingan daerah/ rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat dan gotong royong, dengan tetap memperhatikan sinergitas pembangunan dan **tata kelola pemerintahan yang baik serta penegakan supremasi hukum**.

Untuk mencapai Visi Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 tersebut, akan ditempuh melalui tujuh (7) **misi** pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak.
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.
7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.

Dari ketujuh misi yang ditempuh untuk mewujudkan visi Kabupaten Pemalang tersebut di atas, yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah:

1. Misi 6: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.

Misi 6 adalah misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas PMPTSP sebagai perangkat daerah yang menjalankan tugas pemerintahan di bidang penanaman modal.

2.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Pemalang Hebat Yang Berdaulat, Berjati diri, Mandiri dan Sejahtera			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
MISI 6 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah			
1. Meningkatkan realisasi investasi yang didukung iklim investasi yang kondusif	Meningkatkan nilai realisasi investasi	a. Peningkatan kualitas pelayanan perijinan yang cepat melalui PTSP, dan peningkatan jaringan dengan investor b. Peningkatan Kemudahan pelayanan baik perijinan maupun non perijinan, peningkatan sarana penunjang dan promosi peluang investasi	Peningkatan iklim investasi yang kondusif
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra publik	1. Meningkatnya kapasitas aparatur dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;	a. Pengembangan kapasitas, kualitas, dan etos kerja aparatur; b. Pengembangan dan penerapan regulasi secara konsisten dan menyeluruh	Peningkatan penerapan reformasi birokrasi secara baik menuju pemerintahan yang baik dan bersih
	2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Penerapan SPP, maklumat pelayanan, dan pengukuran kepuasan masyarakat diprioritaskan pada SKPD yang melakukan pelayanan publik	Peningkatan pelayanan publik terutama pada PD yang melakukan pelayanan publik

2.3. Rencana Kerja Tahun 2019

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang direncanakan. Sedangkan Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas dan fungsi organisasi. Kegiatan juga merupakan aspek operasional nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

Secara umum Program yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang pada Tahun Anggaran 2019 terdiri dari 9 program dan 39 kegiatan dengan rincian indikator kinerja sebagaimana berikut di bawah ini:

**Tabel 2.2. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2019
Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(3)	(4)	(5)	(8)
1.	Meningkatnya nilai realisasi investasi	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp.	739.604.689.677
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Nilai SKM	Skor	76
		Presentase pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindak lanjuti / ditangani	%	100

2.4. Perjanjian Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya manajemen organisasi yang baik. Rencana Kinerja akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang di inginkan, dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengecek apakah organisasi telah melaksanakan wewenang yang diamanahkan.

Rencana Kinerja akan berguna apabila dimanfaatkan untuk proses manajemen dalam mencapai hal yang diinginkan. Betapapun tingkat kinerja yang diinginkan mungkin masih bersifat subyektif dan kurang realistis, namun penetapan rencana kinerja ini masih juga bermanfaat sebagai patok pencapaian target yang diinginkan sendiri oleh manajemen.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya nilai realisasi investasi	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	739.604.689.677	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
				Penyediaan jasa surat menyurat
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
				Penyediaan jasa kebersihan kantor
				Penyediaan alat tulis kantor
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
				Penyediaan makanan dan minuman
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah
				Penyediaan Jasa Keamanan
				Rapat-rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
				Pengadaan peralatan gedung kantor
				Pengadaan Mebeleur
				Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
				Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
				Pemeliharaan rutin/berkala Komputer dan Perlengkapannya
				Pemeliharaan rutin berkala pagar dan pembantas lingkungan kantor

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan
				Pemeliharaan rutin/berkala Software dan Sistem Informasi
				Program peningkatan disiplin aparatur
				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
				Sosialisasi peraturan perundang-undangan
				Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD
				Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
				Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
				Program Peningkatan perencanaan dan pelaporan
				Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD
				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
				Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah
				Pengembangan potensi unggulan daerah
				Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
				Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah
				Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
				Penyelenggaraan pameran investasi
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	a. Nilai SKM	76	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
		b. Presentase pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindak lanjuti / ditanganin		Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
				Kajian Kebijakan Penanaman Modal
			100%	Program Penanganan Pengaduan di Bidang Investasi dan Perijinan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan
				Fasilitasi penyelesaian permasalahan di bidang investasi dan perijinan

Dalam Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019 disusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA SKPD dan DPPA SKPD), yang telah melalui serangkaian tahapan perencanaan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Setiap program dan kegiatan didukung oleh Dana APBD yang telah dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD).

Tabel 2.4. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis Dinas PMPTSP Kabupaten Pematang Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya nilai realisasi investasi	4.709.376.000	81.94%
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1.038.064.000	18.06%
Jumlah		5.747.440.000	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

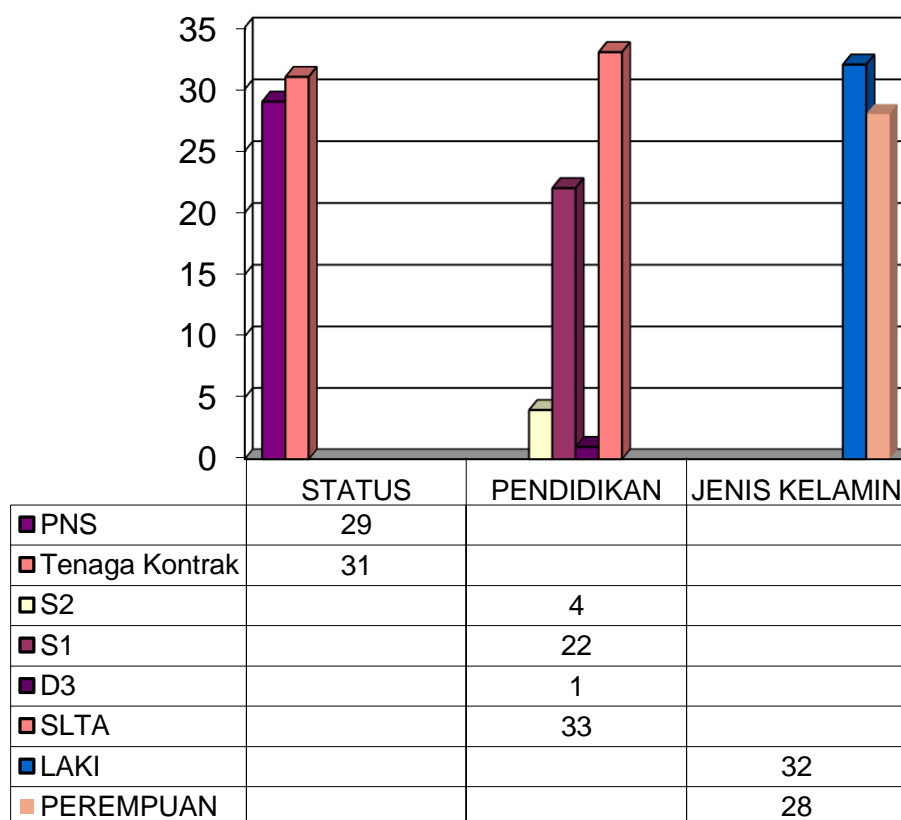
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019

Evaluasi kinerja dilakukan dengan cara menghitung pengukuran kinerja dari pelaksanaan kegiatan/program/ kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Dalam pengukuran evaluasi kinerja, selain dari aspek keuangan juga dikaji melalui aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas. Evaluasi yang dilaksanakan pada Dinas PMPTSP untuk input meliputi :

1. Sumber Daya Manuasia (SDM)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang didukung oleh personil dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Pegawai menurut Jenis



a. Jumlah pegawai menurut jenis :

- ASN : 29 orang
- Non ASN : 31 orang

Jumlah : 60 orang

b. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Pendidikan :

- SD : - orang
- SMP : - orang
- SMA : 16 orang
- D-III : 1 orang
- Sarjana/S1 : 9 orang
- Pasca Sarjana/ S2 : 3 orang

Jumlah : 29 orang

c. Jumlah Pegawai menurut Golongan :

- Golongan IV/c : - orang
- Golongan IV/b : - orang
- Golongan IV/a : 3 orang
- Golongan III/d : 5 orang
- Golongan III/c : 4 orang
- Golongan III/b : 5 orang
- Golongan III/a : 2 orang
- Golongan II/c : 8 orang
- Golongan II/b : 1 orang
- Golongan II/a : 1 orang
- Non PNS : 31 orang

Jumlah : 60 orang

d. Jumlah Pegawai menurut Jenis kelamin :

- Laki – laki : 32 orang
- Perempuan : 28 orang

Jumlah : 60 orang

e. Jumlah Pegawai berdasarkan Diklat Struktural :

- SPAMEN/ Diklatpim II : - orang
- SPAMA/ Diklatpim III : 2 orang
- ADUM/ Diklatpim IV : 6 orang

Jumlah : 8 orang

2. Dana

Hasil evaluasi Kinerja yang diperoleh dengan cara menghitung Pengukuran Kinerja dari pelaksanaan kegiatan/program/ kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Untuk memudahkan dalam hal pemantauan kinerja SKPD dibantu dengan tabel skala nilai yang ditunjukkan dengan notasi warna sebagai berikut dibawah :

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang beserta target serta capaian realisasinya dijelaskan pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun			Tahun 2019			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2019 terhadap Target Akhir 2021
			2016	2017	2018	Target	REALISASI	CAPAIAN %		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8) / (7)	(10)	(11) = (8) / (10)
1	Meningkatnya nilai realisasi investasi	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA)	731.05 4.859. 887	859.98 2.152. 331	889.33 3.659. 281	739.60 4.689. 677	2.586. 454.21 8.618	349,7	749.604 .689.67 7	345,04
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Nilai SKM	75,98	76,06	82,97	76	79,76	104,94	76	104,94
		Presentase pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindak lanjuti / ditangani	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2019

Berdasarkan tabel hasil pengukuran kinerja Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang di atas, secara rinci capaian masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut:

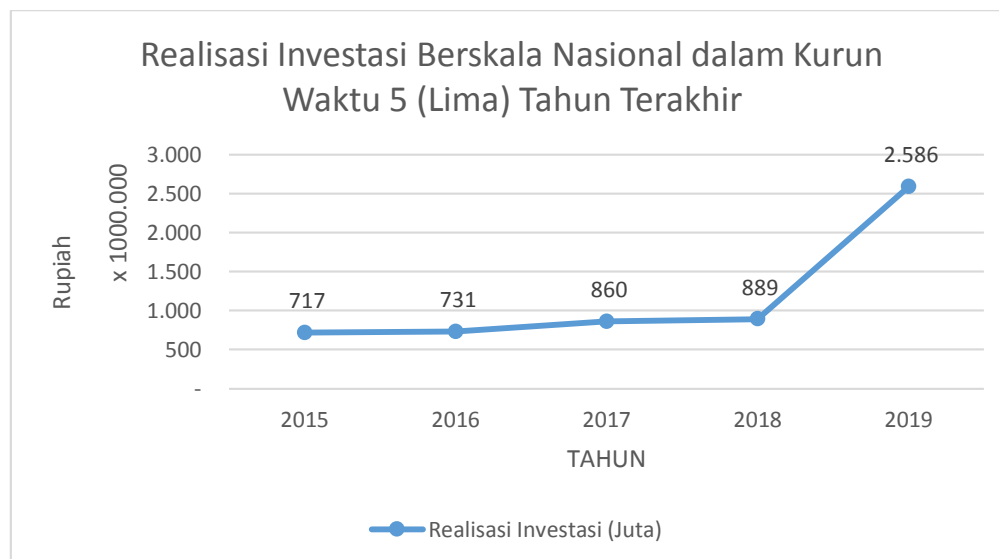
1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya nilai realisasi investasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun			Tahun 2019			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2019 terhadap Target Akhir 2021
			2016	2017	2018	Target	Capaian	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8) / (7)	(10)	(11) = (8) / (10)
1	Meningkatnya nilai realisasi investasi	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA)	731.054.887	859.982.331	889.333.659.281	739.604.689.677	2.586.454.218.618	349,7	749.604.689.677	345,04

target nilai investasi berskala nasional menunjukkan peningkatan dengan realisasi investasi mencapai nilai sebesar Rp.2.586.454.218.618,- atau 349,7% dari target realisasi investasi tahun 2019 sebesar Rp. 739.604.689.677,- Jumlah investor berskala nasional terealisasi sebanyak 101 (Seratus Satu) investor.

Capaian realisasi investasi di Kabupaten Pemalang pada tahun 2019 menunjukkan capaian yang sangat signifikan begitu pula dengan capaian rasio daya serap tenaga kerjanya sebanyak 23.667 orang dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja pada tahun 2018 sebanyak 13.146 orang ada kenaikan sebesar 10.521 orang.

adapun capaian realisasi investasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat digambarkan seperti grafik di bawah ini .



2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun			Tahun 2019			Target Akhir Rensstra	% Capaian s/d 2019 terhadap Target Akhir 2021
			2016	2017	2018	Target	Capaian	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)	
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Nilai SKM	75,98	76,06	82,97	76	79,76	104,94	76	104,94
		Presentase pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindak lanjuti / ditangani	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dalam penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang menunjukkan indikator trend yang positif, dan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang berupaya meningkatkan pelayanan dengan berbagai inovasi guna memudahkan masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

3.3. Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang penanaman modal, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan penanaman modal antara lain:

- 1) Masih rendahnya penggunaan aplikasi pendaftaran perijinan online secara optimal oleh masyarakat.
- 2) Dinamisnya regulasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat sehingga Daerah harus segera menyesuaikan
- 3) Kerjasama usaha besar dengan UMKM yang belum optimal
- 4) Belum semua perusahaan yang memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal membuat hak akses untuk LKPM Online.

- 5) Masih Adanya Program dan Kegiatan yang belum terakomodir pada Renstra 2016-2021

b. Solusi

- 1) Melakukan Sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dan melalui Neon Box, Billboard, Leaflet, Media Cetak dan Elektronik (Radio, Website)
- 2) Melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan.
- 3) Meningkatkan kegiatan fasilitasi kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil melalui kegiatan “Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah”
- 4) Melakukan peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal serta sosialisasi LKPM Online kepada para pengusaha.
- 5) Memasukan program dan kegiatan baru pada renstra baru tahun 2021-2026

3.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama tidak terlepas dari adanya dukungan Sumber Daya. Penggunaan sumber daya dibedakan menjadi tiga yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran. Khusus untuk anggaran akan dibahas dalam akuntabilitas keuangan.

Faktor sumberdaya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Begitu pula kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada didalamnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang didukung oleh 29 pegawai. Data sumber daya manusia aparatur dilihat dari Tingkat Pendidikan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.3. Jumlah Pegawai Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019

No	Unit/Bidang/UPTD	SD	SLTP	SLTA	D-I /II /III	DIV / S1	S2 / S3	Jumlah
1	Sekretariat	-	-	7	-	3	1	31
2	Bidang Pelayanan Perijinan	-	-	7	1	4	-	18
3	Bidang Penanaman Modal	-	-	2	-	2	2	11
	Jumlah	-	-	16	1	9	3	29

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Untuk mencapai sasaran strategis Dinas PMPTSP Kabupaten Pematang Jaya pada tahun 2019, didukung dengan anggaran yang direncanakan sejumlah Rp. 5.747.440.000,- dan terealisasi sejumlah Rp. 4.288.960.743,- dengan capaian kinerja anggaran sebesar 74,62%. Perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi keuangan disajikan dalam tabel berikut :

Kinerja						Keuangan			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			
1.	Meningkatnya nilai realisasi investasi	nilai Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA)	739.604.689.677	2.586.454.218.618	349,7	1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan disiplin aparatur 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6. Program Peningkatan perencanaan dan pelaporan 7. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1.305.861.000,00 1.966.223.000,00 24.000.000,00 485.288.000,00 16.276.000,00 49.918.000,00 861.810.000,00	1.007.605.064,00 930.263.112,00 24.000.000,00 477.480.884,00 16.008.000,00 49.769.500,00 728.138.053,00	77,16 47,31 100 98,39 98,35 99,70 90,76
	Rata-rata Persentase Realisasi Kinerja					Rata-rata Persentase Realisasi Keuangan	3.847.566.000,00	3.232.264.613,00	84,00
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Nilai SKM	76	79,76	104,94	8. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1.003.304.000,00	968.091.770,00	96,49
		Presentase pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindak	100%	100%	100%	9. Program Penangan Pengaduan di Bidang Investasi dan Perijinan	34.760.000,00	33.604.360,00	96,68
						Rata-rata Persentase Realisasi Keuangan	1.003.304.000,00	968.091.770,00	96,49

Kinerja						Keuangan			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			
	Rata-rata Persentase Realisasi Kinerja	lanjuti / ditangani				Rata-rata Persentase Realisasi Keuangan	34.760.000,00	33.604.360,00	96,68
	Persentase Realisasi Kinerja Tahun 2019				184,87	Persentase Realisasi Keuangan Tahun 2019			74,62

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang disamping merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara (LAN) SK. LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, juga merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2019.

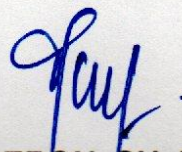
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) didasarkan pada hasil seluruh pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019 termasuk kegiatan pada anggaran Perubahan APBD Tahun 2019. Hasil capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan Penanaman Modal secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen pegawai dan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan seluruh Kabupaten Pemalang.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah:

1. Meningkatkan Pelayanan di Bidang Penanaman Modal
2. Sosialisasi Kepada Stakeholder

Dalam upaya tersebut diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam pembangunan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat. Upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan pihak-pihak terkait harus dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan *civil society*.

Mengetahui,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG



KHAERON, SH, MM
Pembina

NIP. 19680323 199003 1 012